

Analisis Manajemen Risiko dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Wisata

Novi Nugrahani, Anna Isrowiyah, Fita Setiati, Yusna

Politeknik Negeri Malang
novinugrahani@polinema.ac.id

Article History

accepted 15/1/2024

approved 1/2/2024

published 29/2/2024

Abstract

The risks in the tourism industry are enormous as tourism increases. This research aims to identify the tourism profile in BUMDes Kerto Raharja, Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency, and the potential risks that may occur. The research applies a qualitative design. This research was conducted at BUMDes Kerto Raharjo, Turen District, Malang Regency. The data collection techniques used in this research were documentation, interviews, and observation and analyzed descriptively. The research results show that Sanankerto Village is a village that has natural potential, so it can be developed into a tourist village in Malang Regency. Some potential risks in managing Sanankerto Village tourism include poor public facilities, no public transportation, the local community's need to participate in maintaining order, comfort, and cleanliness, and no government regulations regarding management or strict sanctions for tourists who break the rules.

Keywords: *Village Owned Enterprises, risk management, Sanankerto*

Abstrak

Risiko dalam industri pariwisata sangat besar seiring dengan meningkatnya pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi profil wisata di BUMDes Kerto Raharja Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan potensi risiko yang dapat terjadi. Penelitian menerapkan desain kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BUMDes Kerto Raharjo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara dan observasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Desa Sanankerto merupakan desa yang memiliki potensi berupa alam sehingga dapat dikembangkan menjadi desa wisata di Kabupaten Malang. Beberapa potensi risiko dalam pengelolaan wisata Desa Sanankerto diantaranya fasilitas umum kurang baik, tidak ada kendaraan umum, masyarakat sekitar kurang turut menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan, tidak ada peraturan dari pemerintah tentang pengelolaan atau sanksi yang tegas untuk turis yang melanggar aturan.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, manajemen risiko, pengelolaan, Sanankerto



PENDAHULUAN

Salah satu ujung tombak pembangunan di Indonesia adalah desa. Desa merupakan sarana untuk memberdayakan masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat meningkat. Karena itu desa dan pemerintah sebaiknya slaing bersinergis. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014, “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu, Peraturan Pemerintah juga menyatakan bahwa setiao daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam perundang undangan (Puspaningtyas & Ismail, 2023). Oleh sebab itu, desa dapat mengurus kebutuhan rumah tangga sendiri seperti mengelola badan usaha milik desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Sesuai ketetapan pemerintah, desa diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan potensi desa yang ada untuk membangun perekonomian desa agar menjadi desa yang mandiri (Fridayani & Chiang, 2022).

Selain itu, pendirian BUMDes juga terdapat di Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014 yang menjelaskan mengenai desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan seluruh potensi yang dimiliki desa dapat diolah serta dikembangkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. BUMDes sebaiknya membuat laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, BUMDes perlu memiliki pengelolaan keuangan yang baik agar BUMDes dapat berjalan dengan efektif dan semakin berkembang sehingga BUMDes dapat menyusun laporan keuangan yang andal (Wayan et al., 2023). Beberapa kendala yang dihadapi BUMDes adalah kurangnya sumber daya manusia maupun pengelolaan keuangan yang kurang memadai hingga menyebabkan BUMDes tidak berhasil (Utami et al., 2021). Oleh sebab itu, identifikasi risiko merupakan salah satu hal yang penting bagi sebuah organisasi terkhususnya BUMDes, karena pihak BUMDes dapat mengetahui risiko yang mungkin akan terjadi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap usaha BUMDes sehingga BUMDes dapat mengevaluasi aktivitas tersebut (Indah Rahmani et al., 2023).

Pengembangan beberapa sektor BUMDes sekaligus, seperti mengubah atau membuat usaha baru yang terkait jasa, perjalanan, memperluas pasar barang-barang lokal, memiliki efek positif pada pekerjaan dan memperlancar peredaran ekonomi. Namun, selalu ada risiko di dalam mengembangkan suatu objek wisata (Suprayogi et al., 2020). Risiko yang ada perlu dikelola dengan baik agar dapat membantu untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang yang ada. Pengelolaan risiko ini sering disebut dengan manajemen risiko. Manajemen risiko dapat membantu mengurangi kemungkinan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian. Mengurangi risiko dalam industri pariwisata dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah, efisiensi, dan keunggulan komparatif serta melakukan pengembangan destinasi wisata (Koerner et al., 2023). Risiko dalam industri pariwisata sangat besar seiring dengan meningkatnya pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi profil wisata di BUMDes Kerto Raharja Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan potensi risiko yang dapat terjadi. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan masukan mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko tersebut.

METODE

Penelitian menerapkan desain kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Turner et al., 2021). Penelitian ini dilakukan di

BUMDes Kerto Raharjo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes ini adalah Ekowisata Boonpring, Agen 46, Pengelolaan Air Bersih (PAB), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Sampah, dan Event Organizer (EO). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen yang telah dibuat orang lain maupun dokumen yang dibuat oleh diri sendiri. Sedangkan wawancara adalah pertanyaan yang secara langsung diajukan dalam bentuk lisan antara orang yang diwawancarai dengan pewawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dan memberikan pertanyaan yang bebas kepada narasumber tentang manajemen risiko atas pengelolaan wisata. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, (ruang), pelaku, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa. Data penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil obyek Wisata Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo

Berdasarkan hasil studi dokumen menunjukan bahwa Desa Sanankerto secara struktural merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Turen. Secara geografis Desa Sanankerto terletak pada wilayah timur Kabupaten Malang. Desa Sanankerto berada pada koordinat 112.770315 Bujur Timur – 8.168525 Lintang Selatan dan memiliki cakupan luas wilayah sebesar 265,118 Ha yang digunakan sebagai hutan desa, areal persawahan, pemukiman, perkebunan, dan fasilitas umum lainnya. Adapun jarak menuju Ibukota Kabupaten Malang sekitar 30 Km yang ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Topografi Desa Sanankerto memiliki ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan air laut. Desa Sanankerto juga memiliki 9 sumber mata air. Air yang berada di embung dimanfaatkan masyarakat Desa Sanankerto sebagai air minum warga desa, untuk irigasi pertanian, potensi budidaya perikanan air tawar, dan sebagai tujuan wisata air. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Selain itu juga sebagai tukang anyaman atau pengrajin. Rata-rata penduduk di Dusun Kampung Anyar bermata pencaharian sebagai pengrajin dan anyaman dengan bahan baku bambu. Pengerajin memanfaatkan bambu menjadi anyaman bambu berupa *tompo*, *tempeh*, keranjang bambu. Selain itu juga memanfaatkan bambu menjadi tusuk sate, tangkai duparatus, dan kerajinan asbak, miniatur pohon bambu, dan patung dari akarbambu.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari pihak stakeholder Desa Sanankerto, yakni merupakan desa yang memiliki potensi berupa alam sehingga dapat dikembangkan menjadi desa wisata di Kabupaten Malang. Latar belakang Desa Sanankerto dikukuhkan menjadi desa wisata berbasis ekowisata yakni dimulai dari timbulnya keinginan Pemerintah Desa Sanankerto bersama masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam, budaya, ekonomi serta atraksi menjadi sebuah daya tarik wisata yang dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomimasyarakat dan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Ide awal pembangunan Desa Sanankerto menjadi sebuah desa wisata berbasis ekowisata yakni berawal dari inisiatif dari Kepala Desa Sanankerto yakni Bapak Subur dan kemudian ditindaklanjuti oleh masyarakat setempat yang juga memiliki pemikiran sama mengenai pembangunan desa wisata. Kemudian Pemerintah Desa Sanankerto mengundang tokoh masyarakat untuk mengadakan rapat membahas

pentingnya pemanfaatan potensi desa berupa hutan bambu dan embung untuk diangkat menjadi daya tarik wisata. Pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Wisata Andeman “Boon Pring” Desa Sanankerto Turen Kabupaten Malang.

Sejalan juga dengan hasil observasi tim peneliti, bahwa Desa Sanankerto memiliki hutan desa seluas 36,8 hektar dan berada di sekitar Dusun Kampung Anyar. Hutan bambu tersebut bernama hutan bambu Boon Pring. Asal usul nama Boon Pring yaitu berarti Kebun Bambu. Dahulu pada tahun 1910 hutan bambu tersebut merupakan perkebunan kopi milik penjajah Belanda. Setelah Belanda pergi, masyarakat menanaminya dengan tanaman bambu. Sehingga bambu di hutan tersebut tidak tumbuh alami tetapi ditanami oleh masyarakat dahulu. Luas total hutan Bambu Boon Pring tersebut mencapai 36,8 hektar. Awalnya lokasi Hutan Bambu Boon Pring merupakan hutan yang tidak terawat. Sehingga pada tahun 2015, melalui swadaya masyarakat Desa Sanankerto mulai mengelola kawasan tersebut sebagai lokasi ekowisata. Pemerintah Kabupaten Malang kemudian mendapuk Hutan Bambu Boon Pring sebagai kawasan *Arboretum* atau museum bambu berbasis konservasi lingkungan. Selain itu, keberadaan Hutan Bambu Boon Pring juga berperan penting dalam perlindungan mata air yang berada di dalam hutan serta sebagai penunjang debit air yang ada di Embung Andeman.

Tahun 2014 dilakukan pembersihan dan pengerukkan sedimentasi dengan bantuan alat berat *excavator* dari Dinas PU SDA Kabupaten Malang. Pengerukkan tanah di dasar embung dilakukan agar mengurangi sedimentasi serta ada suatu peningkatan kualitas embung berupa penambahan volume daya tampung air dan kualitas air embung. Selain untuk pemanfaatan untuk irigasi pertanian, Embung Andeman dimanfaatkan sebagai areal pengembangan wisata air yang terdapat beberapa permainan air yang disuguhkan, mulai dari perahu untuk berkeliling menikmati embung hingga sepeda air. Pengelolaan ekowisata tersebut dikelola oleh BUMDes Kerto Raharjo. Kemandirian suatu desa dapat diukur dari kemampuan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa baik dari sisi pemerintahan, pembangunan ataupun kemasyarakatan, oleh karena itu desa dituntut untuk bisa menggali potensi yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) (Rachmawati, 2024). Pengembangan objek pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa tak terkecuali yang dilakukan oleh Desa Sanankerto, Turen, Kabupaten Malang. Yang diharapkan mampu mengembangkan dari potensi yang dimilikinya (Lubis et al., 2023).

Dengan dasar tersebut Desa Sanankerto mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo, sebagai pihak pengelola Ekowisata Boon Pring Andeman. Bumdes ini didirikan pada tanggal 27 Maret 2016 dan dilengkapi dengan Peraturan Desa Sanankerto Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Desa Sanankerto. Selain mengelola wisata alam, BUMDes Kerto Raharjo juga bergerak dalam sektor riil yakni dalam pengelolaan air bersih (PAB), koperasi simpan pinjam, serta penyewaan kios kuliner dan toko. Semua usaha tersebut digunakan untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat desa (Hardika et al., 2021) dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Struktur Organisasi BUMDes Kerto Raharjo terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Badan Pengelola, dan Badan Pengawas.

Manajemen Resiko Pada Pengelolaan Wisata

Berdasarkan hasil studi literatur menunjukan bahwa proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritical dalam manajemen risiko, karena merupakan penerapan dari pada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun. Proses manajemen risiko terdiri dari tiga proses besar, yaitu: Penetapan konteks (establishing the context); penilaian risiko (risk assessment); penanganan risiko (risk treatment). Ketiga proses besar tersebut didampingi oleh dua proses yaitu: komunikasi dan konsultasi; monitoring dan review.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa potensi risiko dalam pengelolaan wisata Desa Sanankerto:

1. Fasilitas umum kurang baik
2. Tidak ada kendaraan umum
3. Masyarakat sekitar kurang turut menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan
4. Pihak swasta tidak ada yang turut andil dalam pengelolaan
5. Pemerintah tidak turut serta dalam pemeliharaan
6. Lebih banyak turis lokal yang datang
7. Lingkungan kurang mendukung adanya fasilitas untuk turis
8. Pengelolaan retribusi kurang baik
9. Pemerintah tidak memberikan dana untuk pengelolaan
10. Tidak ada peraturan dari pemerintah tentang pengelolaan
11. Tidak ada sanksi yang tegas dari pengelola untuk turis yang melanggar aturan

Sejalan dengan hasil obervasi, berikut adalah informasi tentang identifikasi potensi risiko yang dipaparkan pada tabel 6.

Tabel 6. Tabel Resiko

| No | Risk Event | Penyebab | Frekuensi | Dampak | Hasil | Mitigasi |
|----|--|---|-----------|--------|-------|---|
| 1 | Fasilitas umum kurang baik | Kurangnya pemeliharaan | 4 | 5 | 20 | Perlu adanya petugas khusus dan konsistensi dalam menjaga kebersihan fasilitas umum |
| 2 | Tidak ada kendaraan umum | Karena lokasi cukup masuk ke area desa maka transportasi umum bisa menggunakan ojek motor | 4 | 4 | 16 | Mungkin perlu ditambah akses kendaraan yang menu lokasi |
| 3 | Bumdes sangat berperan dalam pengelolaan | Pengelolaan diserahkan ke bumdes untuk menambah pendapatan desa | 3 | 3 | 9 | Menempatkan orang yang tepat dalam pengelolaan bumdes sehingga tidak terjadi penyalahgunaan |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|----|--|
| 4 | Masyarakat sekitar kurang turut menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan | Belum mengganggu p sebagai tempat wisata | 4 | 5 | 20 | Peningkatan kesadaran wisata pada masyarakat sekitar |
| 5 | Pihak swasta tidak ada yang turut andil Dalam pengelolaan | Belum ada pihak swasta yang berminat | 3 | 3 | 9 | Perlu adanya dukungan pemerintah dengan masyarakat desa |
| 6 | Pemerintah tidak turut Serta dalam pemeliharaan | Merupakan asset desa sehingga diserahkan ke bumdes | 2 | 2 | 4 | Pengelolaan retribusi dengan baik sehingga selalu tersedia dana untuk pemeliharaan |
| 7 | Lebih banyak turis lokal yang datang | Obyek wisata Lain yang mendukung jaraknya cukup jauh. | 3 | 3 | 9 | Perlu promosi besar-besaran untuk menarik minat turis asing |
| 8 | Lingkungan sekitar kurang bersih | Petugas kebersihan belum maksimal | 4 | 5 | 20 | Perlu adanya petugas Khusus dan konsistensi dalam menjaga kebersihan |
| 9 | Pengelolaan retribusi kurang baik | Hasil retribusi digunakan untuk kepentingan lain | 4 | 5 | 20 | Menempatkan orang yang tepat dalam pengelolaan hasil retribusi |
| 10 | Pemerintah tidak memberikan dana untuk pengelolaan | Diserahkan ke bumdes | 3 | 2 | 6 | Pengelolaan retribusi dengan baik sehingga selalu tersedia dana untuk pemeliharaan |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|---|----|---|
| 11 | Tidak ada sanksi yang tegas dari pengelola untuk turis yang melanggar aturan | Masih belum maksimalnya pengelolaan | 3 | 4 | 12 | Dapat menempatkan petugas yang bisa menegur apabila terdapat pelanggaran aturan |
|----|--|-------------------------------------|---|---|----|---|

Tabel 6 menunjukkan bahwa poin 1,4,8, dan 9 termasuk frekuensi yang hampir sedang terjadi dan kategori resiko sangat tinggi dan poin 2 masuk kategori tinggi. Sedangkan pada poin 6 menunjukkan frekuensi resiko yang jarang terjadi dan pada kategori rendah. Poin lainnya masuk ke dalam frekuensi resiko mungkin terjadi meliputi poin 10 pada kategori rendah, 3,5, dan 7 pada kategori sedang, dan 11 pada kategori tinggi. Proses manajemen risiko menurut pada ISO 31000:2018 diawali dengan penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria (Marhaditha & Pangeran, 2022). Penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria harus saling terkait, sehingga penetapan konteks harus relevan dengan ruang lingkup yang sudah ditetapkan. Perbedaan lain pada proses manajemen risiko yaitu pada ISO 31000:2018 terdapat aktivitas pencatatan dan pelaporan, sementara pada ISO 31000:2009 tidak ada. Tahap penetapan konteks merupakan proses untuk mendefinisikan parameter dasar dalam pengelolaan risiko dengan memberikan pemahaman mengenai lingkungan internal dan eksternal dalam penerapan manajemen risiko.

Konteks (internal dan eksternal) adalah lingkungan di mana organisasi berusaha untuk mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan (eksternal & internal), proses manajemen risiko, dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan dimana sasaran hendak dicapai, *stakeholders* yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas risiko.

Komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang penting mengingat prinsip ISO 31000:2009 manajemen risiko yang kesembilan menuntut manajemen risiko yang transparan dan inklusif, di mana manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh bagian organisasi yang dimaksud disini adalah pengelola Bumdes dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholders tempat wisata (Tirayoh & Pangeran, 2023). Adanya komunikasi dan konsultasi diharapkan dapat menciptakan dukungan yang memadai pada kegiatan manajemen risiko dan membuat kegiatan manajemen risiko menjadi tepat sasaran. Monitoring dan review diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko. ISO 31000: 2009 Risk Management – Principles and Guidelines merupakan standar yang dibuat untuk memberikan prinsip dan panduan general dalam penerapan manajemen risiko. Standar ini menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko merupakan fondasi dari kerangka kerja dan proses manajemen risiko, sedangkan kerangka kerja manajemen risiko merupakan struktur pembangun proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan penerapan inti dari manajemen risiko, sehingga harus dijalankan secara komprehensif, konsisten, dan terus diperbaiki sesuai dengan keperluan. Implementasi manajemen risiko berbasis ISO 31000: 2009 secara mendetail dan menyeluruh pada ketiga komponen tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko yang terdapat di tempat wisata.

SIMPULAN

Desa Sanankerto merupakan desa yang memiliki potensi berupa alam sehingga dapat dikembangkan menjadi desa wisata di Kabupaten Malang. Selain mengelola wisata alam, BUMDes Kerto Raharjo jugabergerak dalam sektor riil yakni dalam pengelolaan air bersih (PAB), koperasi simpan pinjam, serta penyewaan kios kuliner dan toko. berbagai fenomena potensi resiko ditemukan di wilayah pariwisata daru BUMDes Sanakerto dan membutuhkan manajemen resiko yang harus secara sinergis diperhatikan oleh pihak masyarakat dna pemerintah daerah. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan (eksternal & internal), proses manajemen risiko, dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Fridayani, H. D., & Chiang, L.-C. (2022). Digital Opportunities in MSMEs Throughout Economic Disruptions: Entrepreneurs' Experiences and Challenges. In C. N.C., H. J., S. B., & S. M. (Eds.), *Proceedings of the International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, IMSCI* (Vols. 2022-July, pp. 17–22). International Institute of Informatics and Cybernetics. <https://doi.org/10.54808/IMSCI2022.01.17>
- Hardika, A. L., Putra, I. G. S., & Nababan, D. (2021). Membangun Unit Usaha Pengelolaan Sampah Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sukaresik Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 1(3), 260–271. <https://doi.org/10.33197/jim.vol1.iss3.2021.852>
- Indah Rahmani, N., Patabang, M., & Untari, R. (2023). Identification of Covid-19 Impact on UMKM Tourism Business Actors in Pangandaran Coastal Area. *E3S Web of Conferences*, 454. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345403006>
- Koerner, B., Sushartami, W., & Spencer, D. M. (2023). An assessment of tourism policies and planning in Indonesia. *Tourism Recreation Research*. <https://doi.org/10.1080/02508281.2023.2214030>
- Lubis, S. P. Z., Nawawi, Z. M., & Syahbudi, M. (2023). Analisis Potensi Dan Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) : Studi Kasus Wisata Sawah Sabarang Desa Padang Bulan Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 3(2), 1037–1047.
- Marhaditha, S., & Pangeran, P. (2022). Supply Chain Risk Management Based on ISO 31000:2018-Balanced Scorecard to Improve Company Performance: Case Study on UD INTR Yogyakarta 306. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(11), 306–319. <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v5i11.705>
- Puspaningtyas, A., & Ismail, H. (2023). Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejjong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 174–190. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.8383>
- Rachmawati, M. (2024). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. *JRIME: Jurnal Riset MAnajemen Dan Ekonomi*, 2(2), 64–74.
- Suprayogi, S., Mutaqin, B. W., Widyaningsih, Y., Jayanto, G. D., Umarella, M. R., & Marfai, M. A. (2020). Preliminary river morphometry analysis for rafting tourism in the Saba River, Bali Island, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 15(5), 631–638. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.150505>
- Tirayoh, G. H., & Pangeran, P. (2023). Operational Risk Mitigation Based on Risk Management ISO 31000:2018-Balanced Scorecard to Increase the Income and Reputation: Case Study at IEC. *International Journal of Economics Development Research*, 4(2), 2023–2547.

- Turner, D., Ting, H., Lim, T. Y., & Tan, K. L. (2021). Applying Qualitative Approach and Analysis in Business Research. *Asian Journal of Business Research*, 11(3), 1–13. <https://doi.org/10.14707/ajbr.210111>
- Utami, I. D., Santosa, I., & Vidya Leila, M. R. (2021). Priority resilience strategy for micro, small, and medium enterprises for dealing with natural disasters. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 55. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102074>
- Wayan, N., Lyantini, J., & Atmadja, A. T. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Swarna Giri Desa Bresela, Kecamatan Payangan , Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(3), 466–470.